

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

---

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: <b>KEPALA BKKBN</b>
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin 26 Februari 2007
Waktu	: Pukul 14. <sup>00</sup> – 16. <sup>00</sup> WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membicarakan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2006-2007; 2. Membicarakan masalah-masalah actual yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas BKKBN; 3. Lain-lain
Ketua Rapat	H. Muhyiddin Arbusman/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 36 Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, 12 orang Ijin,

#### I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Kepala BKKBN pukul 14.<sup>10</sup> WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat Dengar Pendapat didahului dengan pengantar Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan paparan/jawaban Kepala BKKBN atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI

#### II. KESIMPULAN

Setelah mendengarkan paparan/jawaban dari Kepala BKKBN dan usul/saran dari Anggota Komisi IX DPR RI, Ketua rapat membacakan kesimpulan, yaitu :

1. Komisi IX DPR RI memahami perubahan visi, misi dan strategi dasar BKKBN dalam rangka meningkatkan kinerja program sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 dapat tercapai.

2. Komisi IX DPR RI mendukung BKKBN untuk memperjuangkan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pengganti PP 25/2000) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Pengganti PP No. 8/2003) segera disahkan sehingga dapat menjadi acuan dalam pembentukan kelembagaan KB di daerah berupa organisasi yang berbentuk Dinas.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN agar lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik lembaga pemerintah maupun masyarakat dan menggalakkan program komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) sehingga konsep dan program KB dapat tersosialisasi dengan baik, sesuai dengan pandangan agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat.
4. Komisi IX DPR RI mendukung BKKBN untuk memberi perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap kelompok masyarakat ekonomi rendah, keluarga prasejahtera dan sejahtera I dalam hal pelayanan KB, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan alat-alat kontrasepsi sehingga penyalahgunaan alat kontrasepsi dapat dicegah sedini mungkin.

Rapat ditutup pukul 16.<sup>10</sup> WIB

Jakarta, 26 Februari 2007

Pemerintah  
Kepala BKKBN,

**Dr. Sugiri Syarief, MPA**

Pimpinan Komisi IX DPR-RI  
Wakil Ketua,

**H. Muyiddin Arubusman**